



PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERIKANAN

Tahun 2024





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024. LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada Tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.



Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ranai, 19 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



IRAN SUKYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada Tahun 2024. Capaian Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna diperhitungkan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai, akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Untuk Pelaksanaan dan pencapaian target sasaran strategis, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna secara umum melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis pada Tahun 2024 sebagai Indikator Kinerja Utama dan 2 (dua) sasaran strategis sebagai Non Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari



3 (tiga) program sebagai Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) program sebagai Non Indikator Kinerja Utama, serta 6 (enam) kegiatan sebagai Indikator Kinerja Utama dan 6 (enam) kegiatan sebagai Non Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 target sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dimana terjadi pergeseran anggaran, sehingga adanya perubahan anggaran baik untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama maupun Non Indikator Kinerja Utama. Oleh karena itu, perlunya komitmen penuh dari Pimpinan (Kepala Dinas) serta dukungan dan kerjasama pegawai/staf di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2024.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini, digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam perbaikan pelayanan publik di Tahun yang akan datang. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2024, maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik. Diharapkan untuk waktu yang akan datang, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna akan terus melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan memaksimalkan anggaran berbasis kinerja.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Organisasi	5
1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan	6
1.6. Sistematika Penyusunan	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. RPJMD Tahun 2021 – 2026	13
2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	16
2.2.1. Visi dan Misi	21
2.2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	45
BAB IV. PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	54
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel. 1.	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024	8
Tabel. 2.	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024	18
Tabel. 3.	Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024	20
Tabel. 4.	Perjanjian Kinerja Eselon II, III, IV dan Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	23
Tabel. 5.	Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	26
Tabel. 6.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	27
Tabel. 7.	Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna	27
Tabel. 8.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2024	30
Tabel. 9.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2024 ..	30
Tabel. 10.	Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun 2024	31
Tabel. 11.	Data Produksi Perikanan Budidaya Per Kecamatan Tahun 2023	32
Tabel. 12.	Data Prasarana Budidaya Per Kecamatan Tahun 2024	33
Tabel. 13.	Data Produksi Olahan Produk Perikanan Per Kecamatan Tahun 2024	35
Tabel. 14.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 – 2024	36
Tabel. 15.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020 – 2024	36
Tabel. 16.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 – 2024	38



Tabel. 17.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024	38
Tabel. 18.	Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan Tahun 2020 – 2024	39
Tabel. 19.	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024	44
Tabel. 20.	Rincian Pagu Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2024	47
Tabel. 21.	Realisasi Penyerapan Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2024	51
Tabel. 22.	Realisasi Program dan Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan	10



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Tahun 2024	9
Grafik. 2. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 – 2024	38
Grafik. 3. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024	39
Grafik. 4. Perbandingan Realisasi Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan Tahun 2020 – 2024	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna yang terbentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 yang pada saat itu dikenal dengan nama Dinas Kelautan dan Perikanan. Seiring berjalannya waktu dan dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembatasan pengelolaan wilayah laut yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten yang awalnya kewenangan kabupaten 0 – 4 mil laut menjadi 0 mil laut mengakibatkan berubahnya nama Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Perubahan nama menjadi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11), dan pada Tahun 2022 terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana kedudukan Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan.

Konsep *good governance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan



penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stakeholder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan harus dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten



Natuna didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 306).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap Tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali



dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, dan setiap Tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna tersebut.

Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan;
2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang; dan
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

a. Dasar Pembentukan

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna yang terbentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2001 yang pada saat itu dikenal dengan nama Dinas Kelautan dan Perikanan. Perubahan nama menjadi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11). Terakhir dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16).

Berdasarkan Peraturan diatas, Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
- d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.



d. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- d. Pengelolaan pembudidayaan ikan
- e. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- f. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Jabatan Pelaksana
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Jabatan Pelaksana
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, meliputi :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk, meliputi :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya :
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana



6. UPT Balai Benih Ikan dan Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sub Bagian Tata Usaha

- Jabatan Fungsional
- Jabatan Pelaksana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 83 orang, yang terdiri dari : 4 Orang Gol IV, 32 Orang Gol III, 4 Orang Gol IX, 4 Orang Gol II, 4 Orang PPPK, 28 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 10 Orang Tenaga Kontrak. Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari Tabel 1 dan sumber daya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Grafik 1 serta Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar 1.

TABEL. 1.
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	IX	S2	S1 / D4	D3	SMA / Sederajat	SUPM	SMP	SD
1	2	3				4				5						
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. PNS Non Eselon (Jabatan Pelaksana)	-	-	-	-	-	5	1	-	-	2	1	1	2	-	-
	d. PPPK	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	e. PTT / Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-



NO	JABATAN		ESELON				GOLONGAN				PENDIDIKAN						
			I	II	III	IV	IV	III	II	IX	S2	S1 / D4	D3	SMA / Sederajat	SUPM	SMP	SD
1	2		3				4				5						
	a.	Fungsional Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Muda	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b.	PNS Non Eselon (Jabatan Pelaksana)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	c.	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	d.	PTT / Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya		-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a.	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Muda	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	b.	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c.	Analisis Akuakultur Pertama	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	d.	PNS Non Eselon (Jabatan Pelaksana)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	e.	PTT / Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan		-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a.	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	b.	Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	c.	PNS Non Eselon (Jabatan Pelaksana)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-



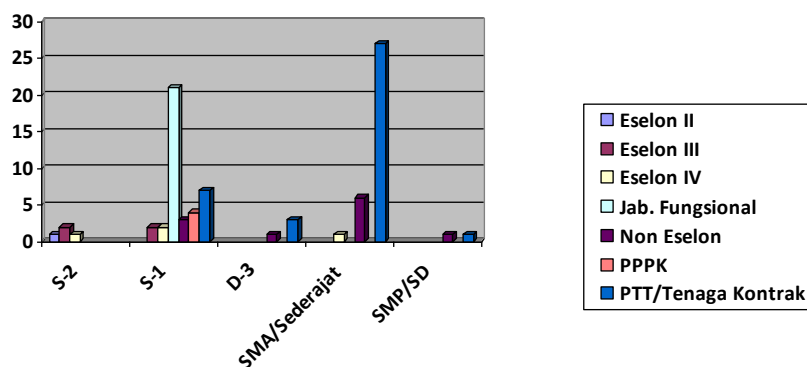
NO	JABATAN		ESELON				GOLONGAN				PENDIDIKAN						
			I	II	III	IV	IV	III	II	IX	S2	S1 / D4	D3	SMA / Sederajat	SUPM	SMP	SD
1	2		3				4				5						
	d.	PTT / Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.		Kepala UPT Balai Benih Ikan (BBI)	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a.	Subbag Tata Usaha BBI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	b.	Analisis Akuakultur Pertama	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	c.	Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan Pertama	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	d.	PNS Non Eselon (Jabatan Pelaksana)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	e.	PTT / Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	19	-	1	-
JUMLAH			-	1	4	4	3	33	5	4	4	39	3	31	4	2	-

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Tabel diatas adalah sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang menjadi pendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 agar berhasil dicapai.

GRAFIK. 1.

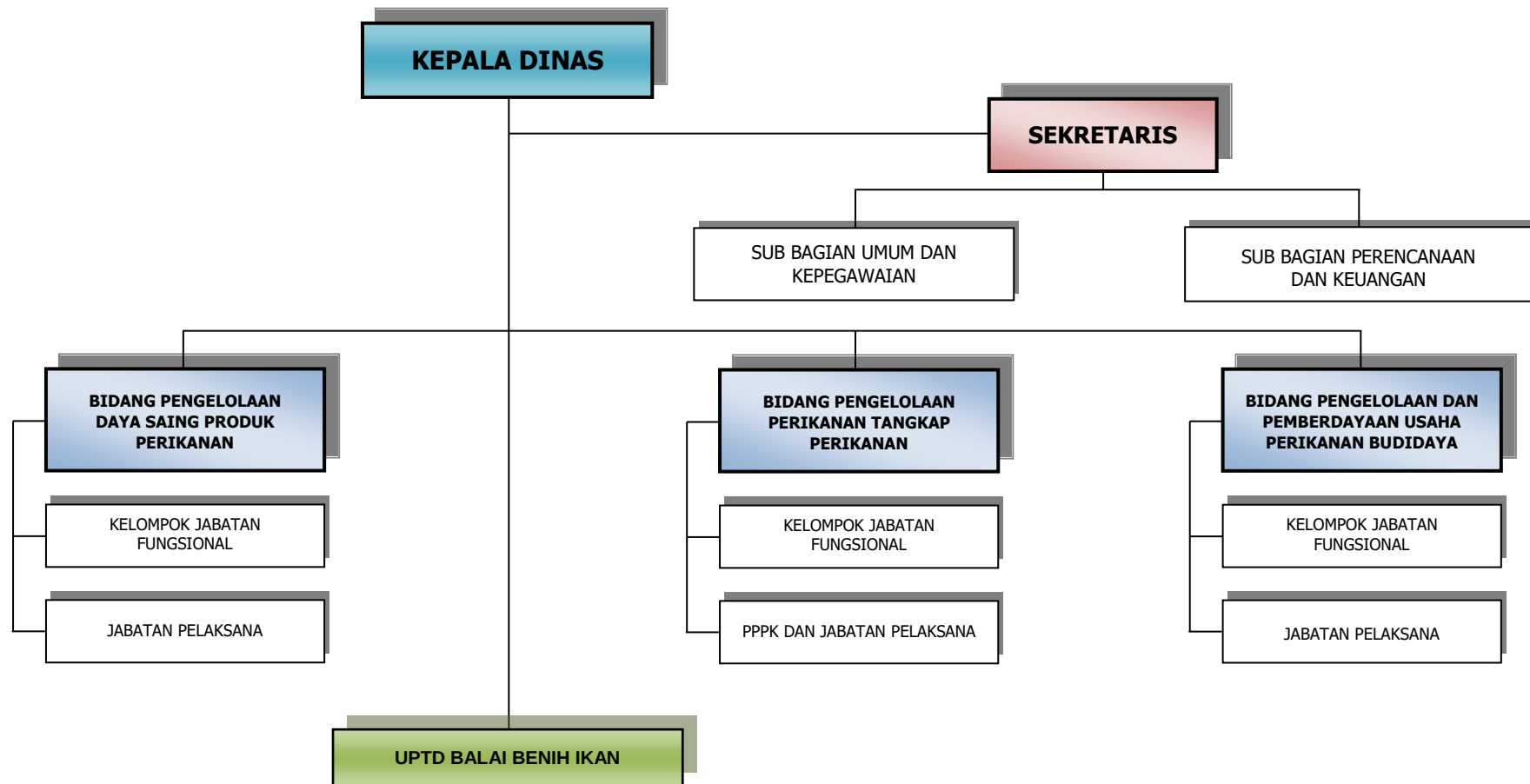
GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024



Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



GAMBAR. 1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KAUPATEN NATUNA





1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD



2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Tahun 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.



3. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut.

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk



berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan konektivitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara

5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya



kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam

6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi *stakeholders* dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor

Misi Kabupaten Natuna menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program SKPD.



Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan perencanaan jangka panjang yang perlu dijabarkan dalam perencanaan berjangka pendek dalam satu Tahun berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026. Dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna disebutkan bahwa untuk mendukung pembangunan di bidang perikanan terdapat beberapa program pembangunan dimana urusan Dinas Perikanan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan melalui 4 program untuk Tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari 4 (empat) program diatas, untuk Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan semua Program meskipun ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan dari 4 (empat) program diatas tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran atau perubahan anggaran yang terjadi pada Tahun 2024.

A. Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan dan sub kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam Tahun Anggaran 2024 guna mendukung dan mewujudkan program serta sasaran prioritas daerah Kabupaten Natuna, sesuai dengan peran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna



dalam memenuhi misi *Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatnya perekonomian di sektor Perikanan.*

B. Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan

Secara ringkas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada kurun waktu 5 (lima) Tahun. Target kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2024 merupakan penjabaran dari target Renstra Dinas Perikanan setiap Tahunnya yang harus dicapai sesuai dengan indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahunnya. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagai berikut :

TABEL. 2.
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	1,13
		1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	136.700,23
		• Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	3
		1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	1
		• Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	1,46
		1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	7
		• Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ton	4.221,36
		• Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		• Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3
		• Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	2,00
		1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	4,21
		• Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit Usaha	15
		2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	6
		• Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	2

Tabel diatas menjelaskan tentang target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2024. Target kinerja tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2024. Adapun anggaran yang tersedia untuk pencapaian target tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



TABEL. 3.
ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.230.768.100,00
		1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.065.669.000,00
		• Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.065.669.000,00
		2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	165.099.100,00
		• Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	165.099.100,00
		B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.475.507.900,00
		3. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	249.187.900,00
		• Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	249.187.900,00
		4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.226.320.000,00
		• Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	267.230.000,00
		• Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	287.838.500,00
		• Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.671.251.500,00
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	924.567.700,00
		5. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	222.391.200,00
		• Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	222.391.200,00
		6. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	702.176.500,00
		• Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	702.176.500,00
Jumlah			7.630.843.700,00



Tabel diatas menjelaskan tentang ketersediaan anggaran Dinas Perikanan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdiri dari 3 (tiga) program sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Perikanan. Anggaran tersebut mengalami penurunan karena adanya pergeseran pada APBD perubahan. Meskipun ketersediaan anggaran terbatas, Dinas Perikanan dapat mencapai target kinerja pada Tahun 2024 dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama terutama dalam internal Dinas Perikanan baik Bidang-bidang, UPTD Balai Benih Ikan, Sub Koordinator dan petugas teknis lapangan yang dikoordinir oleh Sub Koordinator masing-masing kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kerjasama juga terjalin antara pihak Dinas dengan Penyuluh Perikanan Bantu dan instransi-instansi terkait lainnya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang atau keinginan kedepan yang diharapkan. Adapun perumusan Visi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”***. Dari visi tersebut dapat diartikan bagaimana cara pandang atau keinginan serta harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam membangun dan mendayagunakan sumberdaya perikanan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan kabupaten Natuna menjalankan Misi Bupati Kabupaten Natuna dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut adalah misi kedua yaitu ***“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”***.

Kesatuan visi dan misi dalam pembangunan perikanan memang memerlukan suatu proses yang memakan waktu lama tapi sangatlah



diperlukan agar tercapainya kesinambungan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Selain itu tujuan juga merupakan hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu atau jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) Tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur serta hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu Tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang diharapkan untuk dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan;
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang



merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, serta merupakan patokan dalam pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Kepala Dinas Perikanan Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsi yang ada serta sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan yang dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

TABEL. 4.
PERJANJIAN KINERJA ESELON II, ESELON III, DAN ESELON IV
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas			
1	Meningkatnya ekonomi sektor perikanan	Jumlah produksi perikanan	140.921,59 Ton
		Jumlah produksi olahan produk perikanan	435,81 Ton
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas			
1	Terselenggaranya akuntabilitas dinas	Nilai SAKIP	78 Nilai
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum	Persentase layanan administrasi umum	85 Persen
3	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase kehadiran pegawai	95 Persen
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			
1	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja	3 Dokumen
2	Terlaksananya penatausahaan keuangan dinas	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	12 Dokumen
3	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan
4	Terlaksananya penatausahaan aset dinas	Jumlah rekonsiliasi aset bulanan	12 Dokumen
Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen pelayanan umum dan perkantoran	12 Dokumen
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat	12 Dokumen
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			
1	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	136.700,23 Ton
2	Terlaksananya penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	1 Layanan
3	Tersedianya sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	3 Unit
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya			
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	4.221,36 Ton
2	Terselenggaranya pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	21 Kelompok
3	Tersedianya sarana budidaya perikanan	Jumlah sarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	2 Unit
4	Tersedianya prasarana budidaya perikanan	Jumlah prasarana dan prasarana budidaya perikanan tersalur tepat sasaran	3 Unit
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan			
1	Meningkatnya produksi olahan produk perikanan	Produksi olahan hasil perikanan	435,81 Ton
2	Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Persentase peningkatan jumlah UPI yang dibina	4,21 Persen
3	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	6 Jenis
Perjanjian Kinerja UPTD Balai Benih Ikan			
a	Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Balai Benih Ikan		
1	Meningkatnya ketersediaan benih ikan	Jumlah produksi benih ikan	30.000 Ekor
2	Tersedianya sarana dan prasarana pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	2 Unit
b	Perjanjian Kinerja Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan		
1	Tersusunnya bahan rencana kerja UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah bahan rencana kerja UPTD BBI	1 Dokumen
2	Tersediannya laporan UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah laporan UPTD BBI	12 Dokumen

Tabel diatas menjelaskan secara singkat tentang sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam perjanjian kinerja pejabat eselon



II, III, dan IV di Dinas Perikanan pada Tahun 2024. Dalam mendukung capaian kinerja Kepala Dinas, para pejabat eselon III dan IV serta dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana dinas harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja pejabat eselon II, III dan IV secara rinci dapat dilihat pada lampiran LKjIP Tahun 2024.

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Selain itu penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, serta Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, dimana penjabaran dari tujuan secara terukur yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu Tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel 5.



TABEL. 5.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET INDIKATOR SASARAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	132.632,62	134.481,33	135.170,96	136.700,23	137.818,24	138.886,88	138.886,88
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.045,40	4.106,68	4.160,68	4.221,36	4.282,04	4.342,72	4.342,72
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	410,69	418,90	427,27	435,81	444,52	453,41	453,41

Sumber : Renstra Dinas Perikanan 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel 6.

TABEL. 6.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	1. Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan yang dihasilkan dalam 1 (satu) Tahun	140.921,59
		2. Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Produksi Olahan Produk Perikanan yang dihasilkan dalam 1 (satu) Tahun	435,81

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan bertanggungjawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Dimana target kinerja diatas merupakan target Renstra Dinas Perikanan setiap tahunnya yang dijabarkan pada Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

TABEL. 7.
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	ALASAN PENGGUNAAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	1. Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Total Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan
		2. Produksi Olahan Produk Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja Tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama adalah implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dimana dalam pelaksanaanya dinas pada kurun waktu 5 (lima) Tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap Tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap Tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai



dengan cara melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan di bidang perikanan, yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2024. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur melalui capaian sasaran dengan indikator sasaran serta capaian kegiatan dengan indikator kinerja.

A. Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024. Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 yang mencakup 2 (dua) sasaran strategis telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 yang disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Bupati pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Misi 2	:	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Tujuan	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Sasaran	:	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan



TABEL. 8.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	140.921,59	141.002,26	100,05
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	435,81	439,38	100,81

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dimana persentase produksi perikanan pada Tahun 2024 mencapai 100,05%. Tercapainya target jumlah produksi perikanan dipengaruhi oleh adanya bantuan alat bantu penangkapan ikan serta bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. Data jumlah produksi perikanan diatas merupakan penjumlahan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2024.

Untuk indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan juga melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100,81%. Tercapainya target jumlah produksi olahan produk perikanan salah satunya dipengaruhi oleh tingginya produksi dari jenis olahan ikan teri/bilis pada musim-musim tertentu. Jumlah produksi tersebut merupakan laporan produksi dari bidang yang diperoleh dari sub koordinator Dinas Perikanan yang ada di kecamatan. Secara detail jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL. 9.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP, JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN JUMLAH PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	136.700,23	136.701,66	100,00
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.221,36	4.300,60	101,87



NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	435,81	439,38	100,81

Selain melihat tingkat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan, pengukuran atau capaian kinerja Dinas Perikanan juga diukur dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2024. Perbandingan realisasi ini diharapkan dapat melihat peningkatan jumlah produksi perikanan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk meningkatkan produksi perikanan di tahun-tahun selanjutnya. Jumlah produksi yang disajikan pada Tabel 9 di atas diperoleh dari tiap-tiap bidang yang membidangi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan Pengolahan hasil perikanan.

Berikut disajikan data nilai produksi perikanan dari tiap-tiap kecamatan pada Tahun 2024 :

TABEL. 10.
DATA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PER KECAMATAN
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Jumlah Armada (Unit)	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bunguran Barat	784	566	6.405	17.394,96
2	Bunguran Selatan	747	273	3.658	8.650,49
3	Bunguran Tengah	0	0	0	0,00
4	Bunguran Timur	697	532	5.113	15.803,60
5	Bunguran Timur Laut	644	451	3.667	10.458,10
6	Bunguran Utara	281	216	2.816	9.347,92
7	Midai	174	296	1.768	6.090,47
8	Pulau Laut	342	416	570	4.536,08
9	Pulau Tiga	337	366	375	4.971,68
10	Pulau Tiga Barat	131	145	790	6.790,92
11	Serasan	592	506	2.020	10.845,20
12	Serasan Timur	271	233	2.004	9.671,87
13	Subi	344	308	2.655	12.154,09



No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Jumlah Armada (Unit)	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Suak Midai	82	134	838	3.091,11
15	Bunguran Batubi	254	120	539	3.699,77
16	Pulau Panjang	90	91	1.237	7.832,40
17	Seluan	79	99	1.140	5.363,00
Jumlah Th. 2024		5,849	4.752	35.595	136.701,66
Jumlah Th. 2023		5.849	4.752	36.379	135.171,42

Sumber : Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2024

Tabel diatas merupakan data produksi perikanan tangkap, jumlah RTP, jumlah armada dan jumlah alat tangkap pada Tahun 2024 di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna, selain itu juga menjelaskan perbandingan antara Tahun 2023 dan Tahun 2024.

TABEL. 11.
DATA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA PER KECAMATAN
TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Prod. Budidaya Ikan Laut (Ton)	Prod. Budidaya Ikan Air Tawar (Ton)	Prod. Budidaya Air Payau (Ton)	Total Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bunguran Timur	83	43,94	62,07	0,00	106,01
2	Bunguran Timur Laut	39	38,04	23,60	0,00	61,64
3	Bunguran Selatan	20	12,22	8,65	0,00	20,87
4	Bunguran Tengah	67	0,00	72,61	0,00	72,61
5	Bunguran Barat	132	1.214,39	5,79	0,00	1.220,18
6	Bunguran Utara	34	189,91	9,96	0,00	199,87
7	Pulau Tiga	36	504,36	0,85	0,00	505,21
8	Pulau Laut	20	355,58	0,00	0,00	355,58
9	Midai	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suak Midai	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Subi	30	380,25	0,00	0,00	380,25
12	Serasan Timur	21	228,03	0,00	0,00	228,03
13	Serasan	35	416,12	0,00	0,00	416,12
14	Pulau Tiga Barat	33	407,78	0,00	0,00	407,78
15	Bunguran Batubi	37	0,00	59,02	0,00	59,02
16	Pulau Panjang	15	114,71	0,00	0,00	114,71



No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Prod. Budidaya Ikan Laut (Ton)	Prod. Budidaya Ikan Air Tawar (Ton)	Prod. Budidaya Air Payau (Ton)	Total Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Seluan	16	152,74	0,00	0,00	152,74
Jumlah Th. 2024		618	4.058,05	242,55	0,00	4.300,60
Jumlah Th. 2023		618	2.863,17	1.434,05	0,00	4.297,22

Sumber : Data Produksi Perikanan Budidaya Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2023 - 2024

Tabel diatas merupakan data produksi perikanan budidaya, jumlah RTP budidaya, dan jumlah produksi per jenis komoditi ikan budidaya Tahun 2024, serta perbandingannya dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Selain data produksi perikanan budidaya, dibawah ini juga disajikan data prasarana budidaya per kecamatan.

TABEL. 12.
DATA PRASARANA BUDIDAYA PER KECAMATAN
TAHUN 2024

No	Kecamatan	Sarana Prasarana Budidaya					
		KJA	KJT	Kolam	UPR	Bioflok	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bunguran Timur	7	27	127	1	1	163
2	Bunguran Timur Laut	0	26	39	0	0	65
3	Bunguran Selatan	0	10	3	0	0	13
4	Bunguran Tengah	0	0	72	1	0	73
5	Bunguran Barat	0	909	0	0	0	909
6	Bunguran Utara	0	162	23	1	0	186
7	Bunguran Batubi	0	0	16	0	0	16
8	Pulau Tiga	0	206	0	0	0	206
9	Pulau Tiga Barat	0	288	0	0	0	288
10	Pulau Laut	0	49	0	0	0	49
11	Midai	0	0	0	0	0	0
12	Suak Midai	0	0	0	0	0	0
13	Subi	50	69	0	0	0	119
14	Serasan	80	30	0	0	0	110
15	Serasan Timur	95	27	0	0	0	122
16	Pulau Panjang	0	163	0	0	0	163
17	Seluan	0	20	0	0	0	20
Jumlah Th. 2024		232	1.986	280	3	1	2.502
Jumlah Th. 2023		393	1.656	588	3	1	2.641

Sumber : Data Prasarana Budidaya Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2023-2024



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa prasarana budidaya yang lebih dominan digunakan oleh pembudidaya ikan adalah Keramba Jaring Tangkap (KJT) untuk budidaya ikan air laut, sedangkan untuk budidaya ikan air tawar, pembudidaya ikan lebih memilih menggunakan kolam. Untuk meningkatkan angka produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan telah memberikan bantuan prasarana budidaya seperti pembangunan prasarana budidaya sistem bioflok dan hatchery skala rumah tangga (HSRT), pembangunan Unit Perbenihan Rakyat (UPR), bantuan kolam tradisional, dan bantuan prasarana budidaya ikan laut serta bibit ikan kerapu untuk beberapa Pokdakan dan Koperasi yang ada di Kabupaten Natuna.



TABEL. 13.
DATA PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN PER KECAMATAN
TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jenis Olahan (Kg)																							Jumlah Produksi
		Kerupuk Ikan	Kerupuk Atom	Bakso Ikan	Empek-empek	Otak-otak ikan	Kernas	Tabel Mando	Tamban Presto	Ikan Bilis/ Teri	Ikan Asin	Ikan Salai	Pedek	Abon Ikan	Kerupuk Cumi	Ikan Giling	Keripik Bilis	Daging Fillet Rajungan	Sosis Ikan	Nugget Ikan	Cumi Kering	Terasi	Cencalok	Teripang	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Midai	3.406,55	1.060,00	192,00	170,00	24,00	-	-	-	345,00	415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.612,55
2	Subi	600,50	360,10	1.307,70	-	-	-	-	-	-	803,10	-	-	259,90	-	-	-	-	1.701,60	-	-	-	-	-	5.032,90
3	Bunguran Barat	3.629,00	1.898,00	2.078,00	-	-	-	-	-	73.455,00	430,00	1.923,00	-	562,00	-	-	-	6.670,90	-	-	-	293,00	296,90	-	91.235,80
4	Pulau Laut	3.535,00		1.145,00	-	-	-	-	-	25.929,00	10,00	340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00	32.259,00
5	Pulau Tiga	39.676,00	20.919,00	-	-	-	-	-	-	-	3.642,00	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.257,00
6	Pulau Tiga Barat	18.417,00	375,00	6.428,00	-	-	-	-	-	4.983,00	904,00	50,00	-	-	2.603,00	-	-	-	265,00	-	-	-	-	-	34.025,00
7	Serasan	2.596,00	-	464,00	-	-	-	-	-	-	1.458,00	-	-	380,00		1.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.043,00
8	Serasan Timur	10.552,00	-	4.330,00	-	-	-	-	-	-	505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.387,00
9	Bunguran Timur	6.571,00	28.875,00	11.633,00	2.895,00	316,00	1.083,00	168,00	-	5.369,00	-	40.554,50	-	719,00	694,00	-		5.462,85	-	-	-	-	-	-	104.340,35
10	Bunguran Timur Laut	55,00	-	4.748,00	723,00	-	3.208,00	-	-	8.160,00	-	2.710,00	-	172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,70	19.829,70
11	Bunguran Tengah	794,00	-	3.444,70	337,00	-	-	-	-	-	685,00	3.330,00	-	158,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.749,10
12	Bungguran Selatan	205,00	-	-	-	-	-	-	-	10.912,00	213,00	-	5.338,00	-	-	-	333,00	-	-	-	-	-	-	-	17.001,00
13	Bunguran Utara	455,00	-	1.024,00						30.830,60	145,00	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.524,60
14	Bunguran Batubi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Suak Midai	865,00	-	665,00	-	-	-	-	-	660,00	595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	3.085,00
16.	Pulau Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Seluan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Th. 2024		91.357,05	53.487,10	37.459,40	4.125,00	340,00	4.291,00	168,00	-	160.643,60	9.805,10	48.977,50	5.338,00	2.251,30	3.317,00	1.145,00	333,00	12.133,75	1.966,60	-	300,00	293,00	296,90	1.353,70	439.382,00
Jumlah Th. 2023		42.692,80	33.361,00	17.339,30	3.008,00	38,00	2.908,00	169,00	-	264.411,00	6.735,00	50.976,00	1.936,00	1.105,00	935,00	1.690,00	57,00	5.834,00	320,0	400,00	325,00	167,00	177,00	-	434.583,70

Sumber : Data Produksi Olahan Produk Perikanan Per Kecamatan dari Bidang Tahun 2023-2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai produksi olahan produk perikanan pada Tahun 2024 masih didominasi oleh ikan bilis/teri, hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan pada jumlah alat tangkap bagan perahu yang beroperasi.



B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Dinas Perikanan perlu adanya perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja Dinas Perikanan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024. Maka dijabarkan sebuah tabel perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir sebagai berikut :

TABEL. 14.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	139.468,64	141.002,26
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	434,58	439,38

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi kenaikan realisasi Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 pada indikator kinerja jumlah produksi perikanan sebesar 1,33%. Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan meskipun mengalami penurunan realisasi dari Tahun 2024, target kinerja Tahun 2024 tercapai. Dibawah ini juga disajikan tabel perbandingan yang menyajikan target dan realisasi produksi perikanan yang menjadi target kinerja Dinas Perikanan per 5 (lima) tahun.

TABEL. 15.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	121.880,42	124.310,81	2020
				136.526,44	136.678,02	2021



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				138.587,41	139.138,66	2022
				139.331,64	139.468,64	2023
				140.921,59	141.002,26	2024
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	129,79	139,74	2020
				149,65	410,69	2021
				418,90	526,29	2022
				427,27	434,58	2023
				435,81	439,38	2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2024 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra 2021 – 2026. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menargetkan jumlah produksi perikanan pada Tahun 2024 adalah sebesar 140.921,59 Ton, dimana angka tersebut merupakan target dari jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 136.700,23 Ton dan target jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 4.221,36 Ton. Pada Tahun 2024 capaian jumlah produksi perikanan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel diatas. Selain dari jumlah produksi perikanan, tabel diatas juga menjelaskan perbandingan antara target dan realisasi produksi olahan produk perikanan dimana realisasi produksi olahan produk perikanan juga telah melebihi target pada Tahun 2024. Untuk melihat perbandingan antara target dan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan produksi olahan produk perikanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



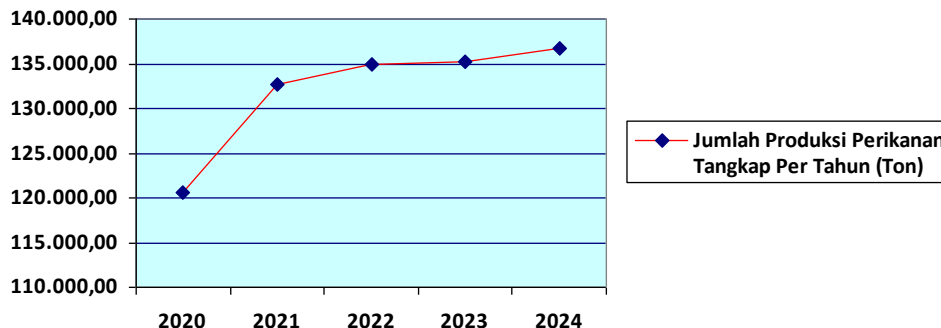
TABEL. 16.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2020 – 2024

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	118.541,62	120.583,25	2020
			132.541,62	132.632,62	2021
			134.481,33	134.874,54	2022
			135.170,96	135.171,42	2023
			136.700,23	136.701,66	2024

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan tangkap untuk periode 2020 – 2024. Besarnya kenaikan produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK 2.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2020 – 2024



TABEL. 17.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020 – 2024

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.338,80	3.727,56	2020
			3.984,82	4.045,40	2021
			4.106,08	4.264,11	2022
			4.160,68	4.297,22	2023

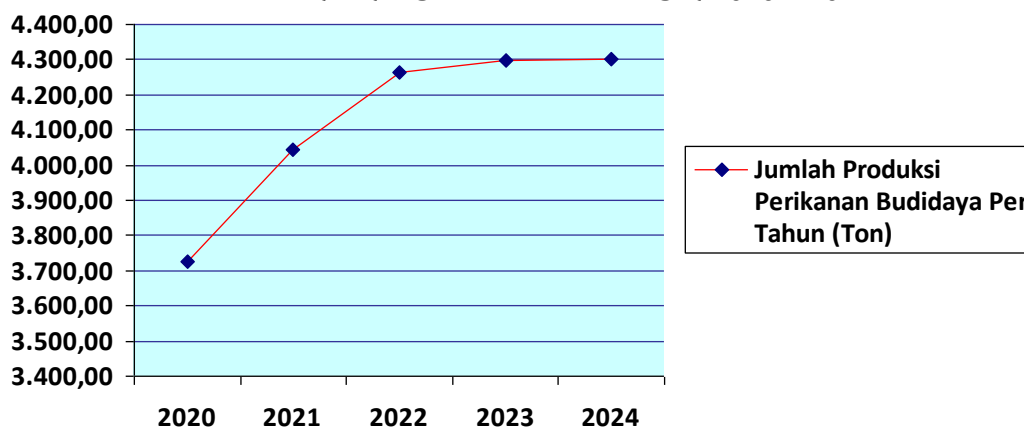


NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4.221,36	4.300,60	2024

Sumber : Data Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan budidaya untuk periode 2020 - 2024. Besarnya kenaikan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

GRAFIK. 3.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2020 - 2024



TABEL. 18.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2020 - 2024

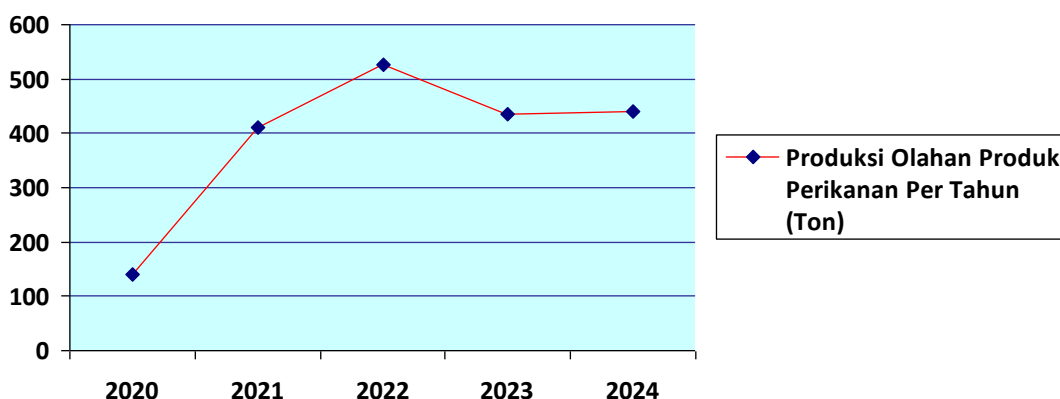
NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
			TARGET	REALISASI	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	129,79	139,74	2020
			149,65	410,69	2021
			418,90	526,29	2022
			427,27	434,58	2023
			435,81	439,38	2024

Sumber : Data Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi produksi perikanan budidaya untuk periode 2020 - 2024. Besarnya kenaikan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



GRAFIK. 4.
PERBANDINGAN REALISASI JUMLAH PRODUKSI
OLAHAN PRODUK PERIKANAN TAHUN 2020 – 2024



C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa jumlah produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) dan jumlah produksi olahan produk perikanan. Pada sasaran meningkatnya ekonomi sektor perikanan dengan indikator jumlah produksi perikanan, capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 100,05% dengan jumlah 141.002,26 Ton, sedangkan jumlah produksi olahan produk perikanan capaian kinerja sebesar 100,81% dengan jumlah produksi sebesar 439,38 Ton. Kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Dalam mendukung keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024, ada 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan yang mendukung yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, serta program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana program tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.



Dalam mencapai keberhasilan kinerja tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam mencapai keberhasilan kinerja yang dilakukan setiap Tahunnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- Adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Medan dan Pemerintah Daerah;
- Adanya bantuan sarana dan prasarana usaha Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti:
 - Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT);
 - Penetapan Kampung Nelayan Maju (KALAJU);
 - Penetapan Kawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB); dan
 - Program *United States Agency for International Development* (USAID) dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) berupa peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya dukungan dari instansi – instansi terkait, seperti :
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam penerbitan izin usaha kelautan dan perikanan;
 - Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DISPERINDAGKOPUM) dalam kerjasama peningkatan kapasitas pelaku usaha pemasaran; dan
 - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam hal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Penerbitan Perizinan/Rekomendasi Usaha Kelautan dan Perikanan Serta Pembinaan Kepada Nelayan.



- Adanya Peran Penyuluh Perikanan Bantu, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Permasalahan/Faktor Penghambat

- Rendahnya keterampilan dan keahlian nelayan lokal dalam penggunaan alat tangkap modern;
- kurangnya modernisasi alat tangkap;
- Rendahnya kesadaran nelayan lokal untuk peralihan penggunaan alat tangkap tradisional ke yang lebih canggih;
- Belum optimalnya pengelolaan atau pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada;
- Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- Belum optimalnya penerapan penggunaan benih ikan yang berstandar Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- Tingginya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap benih ikan laut dari alam;
- Rendahnya penanganan dalam pengendalian hama dan penyakit ikan;
- Masih tingginya biaya operasional budidaya ikan (pakan buatan);
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya perikanan;
- Masih tingginya biaya transportasi pemasaran produk olahan perikanan;
- Masih tingginya biaya produksi produk olahan perikanan;
- Adanya perubahan iklim dan cuaca ekstrim;
- Kurangnya minat pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) untuk membentuk kelompok dalam menjalankan usaha; dan
- Belum optimalnya pemanfaatan akses permodalan usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

3. Solusi/Alternatif Yang Dapat Dilakukan

- Perlunya pelatihan keahlian dan keterampilan bagi nelayan lokal;
- Perlu adanya modernisasi alat tangkap untuk nelayan tradisional;
- Perlu dilakukan sosialisasi peralihan penggunaan alat tangkap tradisional ke yang lebih canggih;



- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan terhadap nelayan;
- Melakukan koordinasi terhadap pelanggaran *illegal fishing* oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- Melaksanakan pelatihan CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan;
- Pembangunan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) ikan air laut;
- Melakukan penanganan, pengendalian hama dan penyakit ikan secara intensif;
- Menekan biaya operasional pakan melalui pembuatan pakan ikan mandiri;
- Perlunya pengembangan potensi budidaya perikanan berbasis kawasan
- Membuka cabang distribusi di daerah pemasaran (Batam/Jakarta/Pontianak) dan meningkatkan daya tahan produk melalui kualitas kemasan;
- Melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (DISPERINDAGKOPUM) terkait kestabilan harga bahan baku produk olahan;
- Melakukan penerapan teknologi tepat guna dalam penanganan cuaca ekstrim terhadap usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan;
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok dan sosialisasi serta fasilitasi perizinan usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- Memberikan sosialisasi kemudahan akses permodalan dan penguatan kemitraan usaha dengan melibatkan beberapa lembaga keuangan/permodalan usaha.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2024, anggaran untuk program dan kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebesar Rp. 17.089.994.096,00. Dari alokasi tersebut pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama dari Program Pengelolaan Perikanan Tangkap,



Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 7.630.843.700,00. Dari pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Perikanan sebesar Rp. 6.706.276.000,00 sedangkan untuk Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan sebesar Rp. 924.567.700,00. Berikut akan dijelaskan efisiensi penggunaan sumber daya melalui tabel matriks sebagai berikut :

TABEL. 19.
TINGKAT EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	100,05	89,52	10,48
		Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	100,81	87,27	12,73

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari sasaran strategis yang terdiri dari dua indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna memiliki hasil yang baik. Untuk indikator kinerja sasaran jumlah produksi perikanan yang merupakan akumulasi atau penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi budidaya dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,05% dan capaian anggaran 89,52%, dimana tingkat efisiensinya sebesar 10,48%. Sedangkan tingkat capaian kinerja jumlah produksi olahan produk perikanan mencapai 100,81% dan capaian anggaran 87,27%, dengan tingkat efisiensinya sebesar 12,73%.

E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tahun 2024 Dinas Perikanan memiliki 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan untuk mendukung sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran jumlah produksi perikanan yaitu : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sedangkan untuk



indikator kinerja sasaran jumlah produksi olahan produk perikanan yaitu : Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Ketiga program tersebut memiliki kegiatan yang berdampak langsung dalam pencapaian target kinerja Dinas Perikanan. Pada Tahun 2024, target kinerja Dinas Perikanan dapat tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan tersedianya anggaran dari APBD Kabupaten Natuna serta adanya dukungan dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Selain itu, terjalinnya kerjasama terutama dalam internal Dinas Perikanan baik Bidang-bidang, UPTD Balai Benih Ikan, Sub Koordinator dan petugas teknis lapangan yang dikoordinir oleh Sub Koordinator masing-masing kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kerjasama juga terjalin antara pihak Dinas dengan Penyuluh Perikanan Bantu dan instransi-instansi terkait lainnya guna mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pencapaian misi strategis yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2024 seperti terlihat pada Tabel 20.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome. Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 2 sasaran utama, dengan 1 program non IKU dan 3 program yang mendukung IKU, serta 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 16.458.994.096,00 dan belanja modal Rp. 631.000.000,00 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 15.196.580.794,65 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 88,92% serta sisa anggaran sebesar Rp. 1.893.414.305,35. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:



TABEL. 20.
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	78 Persen	50.000.000,00	9.856.820,00	19,71
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78 Persen	50.000.000,00	9.856.820,00	19,71
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	9.856.820,00	19,71
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	85 Persen	9.409.150.396,00	8.421.660.457,00	89,51
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	6.511.639.508,00	6.129.551.836,00	94,13
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	6.511.639.508,00	6.129.551.836,00	94,13
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	85 Persen	961.754.000,00	669.299.233,00	69,59
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	114.100.000,00	96.160.165,00	84,28
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.000.000,00	49.923.476,00	90,77
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	25.200.000,00	12.000.000,00	47,62



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	767.454.000,00	511.215.592,00	66,61
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	80 Persen	560.193.000,00	518.770.250,00	92,61
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	68.000.000,00	67.190.000,00	98,81
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	472.193.000,00	451.580.250,00	95,63
	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	78 Persen	941.747.888,00	883.829.027,00	93,85
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.529.000,00	46.820.500,00	85,86
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.389.500,00	1.606.000,00	6,58
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	862.829.388,00	835.402.527,00	96,82
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78 Persen	433.816.000,00	220.210.111,00	50,76
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	213.816.000,00	181.658.111,00	84,96
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	30.000.000,00	18.665.000,00	62,22



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000.000,00	19.887.000,00	10,47
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,13 Persen	3.230.768.100,00	3.024.396.633,00	93,61
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	136.700,23 Ton	3.065.669.000,00	2.960.608.171	96,57
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	3.065.669.000,00	2.960.608.171	96,57
	2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Unit	165.099.100,00	63.788.462,00	38,64
	- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	165.099.100,00	63.788.462,00	38,64
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46 Persen	3.475.507.900,00	2.933.792.575,00	84,41
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	21 Kelompok	249.187.900,00	57.234.750,00	22,97
	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	249.187.900,00	57.234.750,00	22,97
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.221,36 Ton	3.226.320.000,00	2.876.557.825,00	89,16
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	267.230.000,00	220.588.060,00	82,55
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan	3 Unit	287.838.500,00	279.440.876,00	97,08



NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUTPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2.671.251.500,00	2.376.528.889,00	88,97
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2 Persen	924.567.700,00	806.874.309,00	87,27
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	4,21 Persen	222.391.200,00	155.881.046,00	70,09
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	222.391.200,00	155.881.046,00	70,09
	2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	6 Jenis	702.176.500,00	650.993.263,00	92,71
	- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	702.176.500,00	650.993.263,00	92,71
JUMLAH				17.089.994.096,00	15.196.580.794,65	88,92

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan secara keseluruhan sebesar 88,92% atau Rp. 15.196.580.794,65 dari anggaran yang tersedia. Meskipun realisasi anggaran tidak tercapai 100%, pelaksanaan dan capaian target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 tercapai dengan baik.



TABEL. 21.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.230.768.100,00	3.024.396.633,00	93,61
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.065.669.000,00	2.960.608.171	96,57
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.065.669.000,00	2.960.608.171	96,57
	2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	165.099.100,00	63.788.462,00	38,64
	- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	165.099.100,00	63.788.462,00	38,64
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.475.507.900,00	2.933.792.575,00	84,41
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	249.187.900,00	57.234.750,00	22,97
	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	249.187.900,00	57.234.750,00	22,97
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.226.320.000,00	2.876.557.825,00	89,16
	- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	267.230.000,00	220.588.060,00	82,55
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	287.838.500,00	279.440.876,00	97,08
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.671.251.500,00	2.376.528.889,00	88,97
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	924.567.700,00	806.874.309,00	87,27
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	222.391.200,00	155.881.046,00	70,09
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	222.391.200,00	155.881.046,00	70,09
	2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	702.176.500,00	650.993.263,00	92,71



NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	702.176.500,00	650.993.263,00	92,71

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan dari program dan kegiatan yang mendukung IKU tidak terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.

TABEL. 22.
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	A Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persen	1,13	1,13
		1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Ton	136.700,23	136.701,66
		- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	3	3
		1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	1	1



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1
		B Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persen	1,46	3,36
		1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	21	50
		- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	50
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ton	4.221,36	4.300,60
		- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
		- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2
		- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	C Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	2	2,83
		1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persen	4,21	4,21



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit Usaha	15	22
		2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	6	6
		- Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	2	2

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja Dinas Perikanan terealisasi dengan baik. Tercapainya target kinerja Dinas Perikanan dikarenakan adanya kerjasama baik internal Dinas Perikanan maupun dengan pihak lain seperti Penyuluh Perikanan Bantu dan instansi- instansi lainnya yang mendukung tercapainya target kinerja Dinas Perikanan.



BAB IV *PENUTUP*

4.1. Kesimpulan

Dinas Perikanan merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Natuna. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang perikanan, dilaksanakan melalui rencana strategis dan rencana kinerja Tahun 2024 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator jumlah produksi perikanan merupakan gabungan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya. Dari hasil yang didapat, nilai produksi perikanan baik dari sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya juga menunjukkan hasil yang baik dengan tingkat capaian produksi perikanan tangkap sebesar 136.701,66 Ton (100,00%) dan perikanan budidaya sebesar 4.300,60 Ton (101,87%) dengan total produksi perikanan sebesar 141.002,26 Ton (100,05 %) dari target yang ingin dicapai sebesar 140.921,59 Ton.
2. Indikator jumlah produksi olahan produk perikanan pada Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik dengan capaian produksi sebesar 439,38 Ton atau sebesar 100,81% dari target yang ingin dicapai sebesar 435,81 Ton.

4.2. Saran

Target Kinerja Dinas Perikanan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi agar kinerja Dinas Perikanan menjadi lebih baik. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling mendukung antara berbagai pihak



yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Ada beberapa faktor dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan.
2. Dukungan anggaran terutama program dan kegiatan yang mendukung kinerja utama, sehingga pencapaian target dimasa yang akan datang menjadi lebih baik.
3. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama di masa mendatang.
4. Dukungan dan pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan baik berupa saran serta kritik kepada Dinas Perikanan mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, agar kedepan program dan kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih baik.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama

HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	435,81
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	140.921,59

Jumlah Anggaran

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	7.374.705.908,00
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	3.630.690.100,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	3.198.358.400,00
4. PROGRAM PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	902.067.700,00
Jumlah	Rp	15.105.822.108,00

Ranai, 08 Januari 2024

Bupati Natuna,

Kepala Dinas Perikanan


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERIKANAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 15.105.822.108,00 (Lima belas milyar seratus lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan) menjadi Rp. 17.089.994.096,00 (Tujuh belas milyar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh enam) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 20 September 2024
Pihak Pertama,

HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	435,81	439,38	100,82
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	140.921,59	141.002,25	100,06

Jumlah Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.459.150.396,00
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	3.230.768.100,00
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.475.507.900,00
4. Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	924.567.700,00
Jumlah Anggaran	Rp	17.089.994.096,00
Jumlah Realisasi Anggaran	Rp	15.196.580.794,65
Persentase Penyerapan Anggaran		88,92%

Keterangan :

a. Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang	Rp	9.459.150.396,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang	Rp	8.431.517.277,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang		89,14%
b. Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU	Rp	7.630.843.700,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung IKU	Rp	6.765.063.517,65
Persentase Penyerapan		88,65%

Ranai, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS


HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
 NIP. 19750106 200012 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	435,81
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	140.921,59

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	9.459.150.396,00
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	3.230.768.100,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	3.475.507.900,00
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	924.567.700,00
Jumlah	Rp.	17.089.994.096,00

Ranai, 20 September 2024

Bupati Natuna,

Kepala Dinas Perikanan



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005



DATA CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai/ Predikat	78	79,60	50.000.000,00	9.856.820,00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	78	79,60	50.000.000,00	9.856.820,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	50.000.000,00	9.856.820,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	100	9.409.150.396,00	8.435.860.457,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	6.511.639.508,00	6.129.551.836,00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	55	45	6.511.639.508,00	6.129.551.836,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum	Persen	85	100	961.754.000,00	669.299.233,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	114.100.000,00	96.160.165,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	55.000.000,00	49.923.476,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	25.200.000,00	12.000.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	230	767.454.000,00	511.215.592,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persen	80	95,01	560.193.000,00	518.770.250,00
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	18	68.000.000,00	67.190.000,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	47	472.193.000,00	451.580.250,00
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	20.000.000,00	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan perkantoran	Persen	78	100	941.747.888,00	883.829.027,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	54.529.000,00	46.820.500,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	24.389.500,00	1.606.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40	40	862.829.388,00	835.402.527,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Persen	78	133,68	433.816.000,00	220.210.111,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	90	213.816.000,00	181.658.111,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	35	30.000.000,00	18.665.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2	3	190.000.000,00	19.887.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



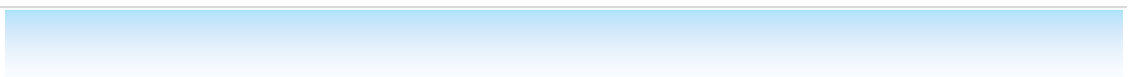
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
			Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1,13	1,13	3.230.768.100,00	3.024.396.633,00
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	136.700,23	136.701,66	3.065.669.000,00	2.960.608.171,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Unit	3	3	3.065.669.000,00	2.960.608.171,00
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	1	1	165.099.100,00	63.788.462,00
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1	165.099.100,00	63.788.462,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	1,46	3,36	2.881.144.400,00	2.447.076.247,00
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	21	50	249.187.900,00	57.234.750,00
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	50	249.187.900,00	57.234.750,00
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budaya	Ton	4.221,36	4.297,22	2.631.956.500,00	2.389.841.497,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	267.230.000,00	220.588.060,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	2.364.726.500,00	2.169.253.437,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	2	2,83	924.567.700,00	806.874.309,65
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	4,21	4,21	222.391.200,00	155.881.046,00
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	15	22	222.391.200,00	155.881.046,00
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jenis	6	6	702.176.500,00	650.993.263,65
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	2	702.176.500,00	650.993.263,65
			UPT BALAI BENIH IKAN						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	Persen	1,33	3,36	594.363.500,00	486.716.328,00





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Uraian Program / Kegiatan	Kinerja				Anggaran	
				Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
				BUDIDAYA					
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	30.000	36.523	594.363.500,00	486.716.328,00
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	287.838.500,00	279.440.876,00
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3	306.525.000,00	207.275.452,00
Jumlah								17.089.994.096,00	15.196.580.794,65



HASIL CAPAIAN DAN TARGET PROGRAM RPJMD 2021-2026
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN PADA TAHUN 2021	TARGET DAN CAPAIAN SETIAP TAHUN									TARGET DAN CAPAIAN AKHIR RPJMD		
				2022			2023			2024					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN														
3.25.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	134.481,33	134.874,54	100,29	135.170,96	135.171,42	100,00	136.700,23	136.701,66	100,00	683.057,64	406.747,62	59,54
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.106,08	4.264,11	103,85	4.160,68	4.297,22	103,28	4.221,36	4.300,60	101,81	21.406,08	12.861,93	60,08
3	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	410,69	418,9	525,95	125,56	427,27	434,58	101,71	435,81	439,38	100,81	2.179,91	1.399,91	90,56
4	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	18.342	35.000	135.000	385,71	45.000	60.000	133,33	50.000	81.673	163,34	225.000	276.673,00	122,96
5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Orang	130	135	160	118,52	135	229	169,63	145	500	344,82	725	389,00	122,62
6	Jumlah Diversifikasi Usaha	RTP	105	10	24	240	10	38	380,00	10	46	460,00	645	62,00	16,74
7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan Yang Operasional	Persen	-	-	-		-	-	-	1	1	100	1	1	100,00
8	Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Kelompok	0	5	7	140	5	23	460,00	5	12	240,00	25	42,00	168,00



EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kinerja /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
01.	01.				DINAS PERIKANAN				
3.					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.	25.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.	25.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai/ Predikat	78	79.60
3.	25.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	78	79.60
3.	25.	01.	2.01.	01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2
3.	25.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	100
3.	25.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1
3.	25.	01.	2.02.	01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	55	45
3.	25.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Persen	85	100
3.	25.	01.	2.06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
3.	25.	01.	2.06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
3.	25.	01.	2.06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10
3.	25.	01.	2.06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	230
3.	25.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	Persen	80	95.01
3.	25.	01.	2.07.	05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	18
3.	25.	01.	2.07.	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	47
3.	25.	01.	2.07.	08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0
3.	25.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan perkantoran	Persen	78	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kinerja /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
3.	25.	01.	2.08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
3.	25.	01.	2.08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
3.	25.	01.	2.08.	04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40	40
3.	25.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Perkantoran	Persen	78	133.68
3.	25.	01.	2.09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	90
3.	25.	01.	2.09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	35
3.	25.	01.	2.09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3
3.	25.	03.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1.13	1.13
3.	25.	03.	2.01.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	136700.23	136701.66
3.	25.	03.	2.01.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Unit	3	3
3.	25.	03.	2.03.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	1	1
3.	25.	03.	2.03.	02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikann (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1
3.	25.	04.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	1.46	3.36
3.	25.	04.	2.02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	21	50
3.	25.	04.	2.02.	04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	50
3.	25.	04.	2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budaya	Ton	4221.36	4297.22
3.	25.	04.	2.04.	01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Dokumen	1	1
3.	25.	04.	2.04.	01.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2
3.	25.	06.			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	2	2.83

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)
Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kinerja /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024
3.	25.	06.	2.02.		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	4.21	4.21
3.	25.	06.	2.02.	02.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	15	22
3.	25.	06.	2.03.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jenis	6	6
3.	25.	06.	2.03.	02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	2
01.	02.				UPT BALAI BENIH IKAN				
3.					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.	25.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.	25.	04.			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	1.33	3.36
3.	25.	04.	2.04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	30000	36523
3.	25.	04.	2.04.	02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2
3.	25.	04.	2.04.	03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3

Kode	Sasaran	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang direvisi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang direvisi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah		
					5		6		7				I		II		III		IV			12=8+9+10+11		13=12/100		14=6+12			15=14/5100	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		Rp	k
3.25.04.2.02.01.		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	100,000,000	0	6	85,000,000	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02.04.		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Menerima Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	150,000,000	46	87,410,696	8	68,926,981	8	0	0	7,660,050	7	15,868,675	5	7,710,675	29	25,995,950	50	57,234,750	625.00	0.00	96	87,410,696	1,200.00	58.27	Dinas Perikanan	
3.25.04.2.04.		Pengadaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	165,000,000	0	25000	1,631,800,000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	165,000,000	0	1	1,631,800,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan
3.25.04.2.04.		Pengadaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	4160.68	592,790,711	8661.33	3,343,759,032	4160.68	2,581,800,000	4160.68	0	740	38,169,630	1241.91	53,699,800	1440.69	1,357,455,307	877.99	721,928,700	4300.69	2,169,263,437	103.38	0.00	1261.92	3,343,759,032	309.13	563.12		
3.25.04.2.04.01.		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	400,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	Dinas Perikanan	
3.25.04.2.04.02.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	193,790,711	0	3	1,631,800,000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan	
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	200,000,000	13	3,343,759,032	2	950,000,000	2	0	0	36,959,630	0	53,699,800	2	1,357,455,307	0	721,928,700	2	2,169,263,437	100.00	0.00	15	3,343,759,032	750.00	1,671.89	Dinas Perikanan	
3.25.06.		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Bahan Perikanan	Persen	2.00	600,000,000	9.03	872,144,437	2.00	856,453,700	2.00	0	0	9,566,950	0	45,858,157	0	439,581,350	2.83	155,986,807	2.83	650,993,264	141.50	0.00	11.86	872,144,437	593.00	145.36		
3.25.06.2.01.		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan ikan yang memiliki TDU-WHP	Unit	2	100,000,000	0	2	160,000,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.25.06.2.01.05.		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Data	1	100,000,000	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan	
3.25.06.2.02.		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UP yang dibina	Persen	3.44	200,000,000	0	3.44	160,000,000	3.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3.25.06.2.02.02.		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit	10	200,000,000	0	10	150,000,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Dinas Perikanan	
3.25.06.2.03.		Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	6	300,000,000	2	872,144,437	6	556,453,700	6	0	0	9,566,950	0	45,858,157	6	439,581,350	0	155,986,807	6	650,993,264	100.00	0.00	8	872,144,437	133.33	290.71		
3.25.06.2.03.02.		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	300,000,000	8	872,144,437	2	556,453,700	2	0	0	9,566,950	0	45,858,157	2	439,581,350	0	155,986,807	2	650,993,264	100.00	0.00	10	872,144,437	500.00	290.71	Dinas Perikanan	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PERIKANAN																												
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																												
3.25.04.		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1.33	195,000,000	70.23	488,578,573	1.33	220,000,000	1.33	0	0	14,796,500	0	78,060,502	0	97,725,950	3.36	16,992,500	3.36	207,275,452	252.63	0.00	73.99	488,578,573	5,533.08	255.68		
3.25.04.2.04.		Pengadaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	25000	195,000,000	70000	488,578,573	25000	220,000,000	25000	0	0	14,796,500	0	78,060,502	0	97,725,950	36523	16,992,500	36523	207,275,452	146.09	0.00	106523	488,578,573	426.09	255.68		
3.25.04.2.04.03.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	195,000,000	5	488,578,573	2	220,000,000	2	0	0	14,796,500	0	78,060,502	3	97,725,950	0	16,992,500	3	207,275,452	150.00	0.00	8	488,578,573	400.00	255.68	Dinas Perikanan	